

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDESTRIAN DI KOTA PEKANBARU (Studi kasus Jalan Sudirman)

Nina Edi Yenita dan Chalid Sahuri

Email : naninaedi@yahoo.co.id

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam. Pekanbaru 28293

Abstract

In this case the researchers background by the phenomenon of motor vehicles parked in the pedestrian area and the street vendors who sell diarea pedestrian, less specifically enforcement officers in carrying out the pedestrian, rather than reducing the deviation would lead to many problems in the field. This study aimed to determine the implementation of controlling pedestrian in the city of Pekanbaru and the factors that influence the implementation of the curb. The benefits that can be taken from the results of this study will include, first: in the review of the theoretical benefits is to develop and improve the ability to think through the application of theory in the can author. Secondly, in terms of practical benefit is to add knowledge about the implementation of the curb pedestrian writer in Pekanbaru, for consideration and input for the benefit of the Department of Transportation and the parties who wish to pursue research related to the same problem.

The theory used in this study is Mahmudi's theory about the effectiveness of the entire cycle of the input-process-output, and made repairs to the factors that influence the effectiveness of controlling pedestrian in the city of Pekanbaru. The method used in this research is descriptive qualitative data collection techniques include observation and interviews. Key informants were used in this study is the Head of the Department of Transportation parking UPTD Pekanbaru, Secretary UPTD parking, staff parking UPTD, society. Later studies developed by the snowball sampling method.

Based on the results of research through interviews and observations, it can be concluded that the implementation of the curb pedestrian in the city of Pekanbaru has not done well. In other words, there are still many problems that arise in its implementation. The factors that affect the implementation of the curb pedestrian in Pekanbaru include public participation, these factors have an enormous influence on the effectiveness of the implementation of the curb pedestrian in the city of Pekanbaru.

Keywords: Execution, Control, Effectivity

PENDAHULUAN

Sebagai kota besar lainnya, Pekanbaru senantiasa memiliki permasalahan perkotaan yang semakin meningkat. Masukan bagi

perancang kota yang berorientasi pada pejalan kaki di Indonesia pada umumnya, khususnya pada suatu kajian fungsi pedestrian di Jalan Sudirman ditinjau dari aspek kegunaannya. Dinas Tata Kota Pekanbaru bukan tidak mempunyai alasan besar mengapa pedestrian di kota Pekanbaru dibuat khususnya di Jalan Sudirman tersebut. Dalam penataan kota pemerintah membuat pedestrian demi kenyamanan masyarakat untuk melakukan aktifitas. Jalur pedestrian pada sebuah kota adalah bagian yang sangat penting, baik bagi kelengkapan kota maupun bagi pejalan kaki dengan aman dan nyaman. Pedestrian ini telah dibangun pada tahun 2009 lalu dan mendapat respon yang sangat positif bagi masyarakat Pekanbaru khususnya pada pejalan kaki. Dengan kehadiran pedestrian selebar dua meter disepanjang jalan Sudirman ini memberikan ruang luas bagi pejalan kaki untuk melintas dikawasan padat tersebut. Kehadiran pedestrian ini lebih tampak makin menarik dengan dipasangnya sejumlah tempat duduk dan lampu penerangan jalan yang dibuat semenarik mungkin. Adapun pentingnya Pedestrian adalah sebagai tempat untuk kenyamanan dan kelancaran bagi pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya. Dengan berjalan kaki sebenarnya aktifitas menuju kawasan tujuan dapat dilakukan dengan lebih bebas, dan lebih fleksibel meskipun dengan catatan bahwa hal ini hanya dilakukan dengan jarak dekat. Karena tidaklah efektif jika kegiatan pejalan kaki dilakukan dalam jarak yang jauh. Hal tersebut sangat menguras tenaga bagi pejalan kaki, sehingga pada saat sampai tujuan hanya lelah yang tersisa, itulah mengapa jalur pejalan kaki sangat diperhitungkan keberadaannya. Pedestrian merupakan perancang kota yang penting, yaitu membentuk hubungan antara aktifitas pada suatu lokasi. Tujuan utama adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna pejalan kaki.

Pedestrian di kota-kota besar mempunyai fungsi terhadap dampak yang sangat penting bagi perkembangan kehidupan kota, antara lain ;

1. Pedestrian dapat menumbuhkan aktifitas yang sehat sehingga mengurangi kerawanan kriminalitas.
2. Pedestrian dapat merangsang berbagai kegiatan ekonomi sehingga berkembang kawasan bisnis yang menarik.
3. Pedestrian sangat menguntungkan sebagai ajang kegiatan promosi, periklanan, pameran, kampanye dan lain sebagainya.

Fungsi jalur pedestrian yang disesuaikan dengan perkembangan kota adalah sebagai fasilitas pejalan kaki, sebagai unsur keindahan kota, sebagai media interaksi sosial, sebagai saran konservasi kota dan tempat bersantai dan bermain.

Ada beberapa manfaat serta nilai tambah yang diperoleh dari pembangunan jalur pedestrian, diantaranya sebagai berikut ;

1. Memberikan lebih banyak lagi ruang publik bagi masyarakat kota. perkembangan kota yang bergulir cepat memang terkadang melupakan kebutuhan warga terhadap ruang terbuka yang aman dan nyaman. Tak sedikit ruang komersial menjadi alternatif ruang terbuka publik.

2. Mengurangi kemacetan kota serta mengurai kemacetan yang ada.

Karna ketidak mampuan pemerintah dalam membangun sektor transportasi daerah, membuat transportasi publik tidak begitu diminati dan mereka beralih ke transportasi individu yang semakin menambah kemacetan.

Pada Keputusan Menteri Nomor: HK.601/20/24 Phb-2000 tanggal 20 Juli 2000 mengenai rincian kewenangan Kabupaten / Kota di bidang perhubungan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru NO: 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Kota Pekanbaru. Pada BAB XVI Fasilitas Lalu Lintas Bagian Kesatu tentang fasilitas penjalan kaki yang terdapat pada pasal 130 ayat 2 yang mengatakan bahwa “ Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan penjalan kaki dan atau pemakai jalan lainnya”. Tujuannya untuk memberitahu kalau adanya hak para penjalan kaki didalamnya.

Jika dilihat dengan kasat mata, memang dibeberapa ruas jalan yang ada di kota Pekanbaru terdapat trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pedestrian yang dibangun sepanjang Jalan Sudirman sampai saat ini belum sepenuhnya bisa digunakan oleh penjalan kaki dengan baik. Pasalnya sampai sekarang masih banyak terlihat sepeda motor yang terparkir disana dan ada juga beberapa para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang pedestrian. Sehingga pedestrian tersebut semakin sempit dilalui oleh penjalan kaki.

Berbagai masalah yang ada terkait dengan penjalan kaki menimbulkan pertanyaan. Apakah penertiban pedestrian telah terlaksana dengan baik sehingga dapat memenuhi kenyamanan penjalan kaki untuk beraktifitas didalamnya ? Apakah dalam kondisi tersebut mempengaruhi perilaku penjalan kaki dalam menggunakan ruang publik untuk sirkulasi ? Kawasan ini berpotensi untuk lebih berkembang dari saat ini. Tetapi perkembangan tersebut dapat berdampak negatif terhadap berjalannya fungsi ruang publik dalam hal ini adalah fungsi jalur pedestrian sebagai wadah untuk aktifitas penjalan kaki dapat berjalan dengan baik, ditinjau dari tuntutan attribute kenyamanan. Dari permasalahan tersebut diatas serta dengan fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan statement Judul yaitu, “Efektifitas Pelaksanaan Penertiban Pedestrian di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Jalan Sudirman)”

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru.

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru studi kasus Jalan Sudirman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk penerapan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang administrasi manajemen dalam penertiban pedestrian.

b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan permasalahan yang sama.

2. Praktis

a. Sebagai masukan bagi pemerintah kota dalam mengambil keputusan, pengelola serta pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap Penertiban Pedestrian.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pedestrian Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. Adapun yang di jadikan informanyang di anggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan yang dapat dipercaya melakukan penertiban dengan dengan kepala bagian penertiban dari informan tersebut dan ditambah lagi dengan informan lainnya. Dimana teknik pemilihan informan tersebut melalui snowball sampling. Adapun yang di jadikan informanyang di anggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan yang dapat dipercaya melakukan penertiban dengan dengan kepala bagian penertiban dari informan tersebut dan ditambah lagi dengan informan lainnya. Dimana teknik pemilihan informan tersebut melalui snowball sampling.

HASIL

Didalam bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari Dinas Perhubungan, petugas penertiban, dan masyarakat yang terpilih menjadi informan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru. Dari hasil ini terkumpul sejumlah data yang diperlukan tentang pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru.

Untuk dapat melaksanakan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru, dibutuhkan adanya pengelolaan atau lebih dikenal dengan istilah manajemen. Manajemen atau pengawasan merupakan suatu proses yang sangat penting karena:

1. Suatu pekerjaan akan terasa berat dan sulit jika dikerjakan sendiri, sehingga membutuhkan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
2. Suatu organisasi akan berhasil jika manajemen diterapkan dengan baik. Hal ini karena manajemen yang baik dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
3. Dengan manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan.
4. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan untuk dapat mencapai tujuan secara teratur.
5. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.

Dalam penelitian ini, penulis menfokuskan permasalahan ke dalam 3 (tiga) indikator yang dapat menerangkan bagaimana pelaksanaan penertiban pedestrian yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru, penulis meneliti dari sudut pelaksanaan

penertiban yang meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Input
2. Proses
3. Output

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing-masing indikator tersebut menurut jawaban dan wawancara terhadap informan yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator diatas tersebut.

A. Penertiban Pedestrian di Kota Pekanbaru

Penertiban merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan sekelompok organisasi untuk memastikan apakah suatu tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Penertiban merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang diluar prosedur sebenarnya. Penertiban merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas pegawai menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Dalam menjawab persoalan yang ada, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan penertiban, yaitu sebagai berikut:

1. Input
2. Proses
3. Output

1. Input

Dalam melakukan pelaksanaan penertiban maka harus adanya suatu input yang dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar dalam melaksanakan penertiban tersebut. Input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi input dalam pelaksanaan penertiban pedestrian Kota Pekanbaru selanjutnya akan dilakukan tindakan dalam melaksanakan penertiban, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini dilakukan guna menimalisir penyimpangan yang terjadi ketentuan ini berupa :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan penertiban pedestrian harus diperlukannya sumber daya manusia guna untuk mempelancar poses penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru. Meski perintah-perintah kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya tidak ada atau kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan penertiban pedestrian oleh UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maksudnya yaitu dapat dilihat dari tingkat kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas

dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas

Perhubungan dapat dilihat melalui :

a. Kualitas petugas penertiban

b. Jumlah petugas penertiban

Kualitas dan jumlah petugas penertiban adalah salah satu modal modal utama dalam melakukan penertiban, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas dan jumlah petugas penertiban yaitu mampu melakukan penertiban dengan baik tahu benar standar yang telah ditentukan dan tentunya orang-orang yang berkompeten dalam bidang penertiban. Dalam melakukan penertiban terhadap pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru yang ditunjuk adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Kualitas dan jumlah pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari pihak-pihak yang terlibat adalah antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpikiran, Sekretaris UPTD Parkir, Staff – staff UPTD parkir.

Dapat disimpulkan bahwa pihak UPTD Parkir dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan sudah memiliki personil yang cukup, namun begitu, jumlah personil yang jumlahnya memadai saja tidak akan berarti apa-apa jika mereka tidak memiliki kecakapan yang disertai tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sebuah organisasi yang tidak memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, maka organisasi tersebut tidak akan bisa menjalankan dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

b. Dana / Biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam penertiban pedestrian ini Pihak UPTD Parkir Dinas Perhubungan mengatakan bahwa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak Dinas Perhubunga tidak mempunyai dana pasti untuk penertiban, tetapi kalau ada dana tambahan dari Wali Kota kami baru melakukan razia. Karena pihak Dinas Perhubungan tidak memiliki dana sendiri dalam rangka penertiban pedestrian. Misalnya kegiatan-kegiatan terkait dengan pelaksanaan penertiban pedestrian berupa razia kepada sepeda motor yang parkir diatas pedestrian. Razia ini sendiri merupakan program yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang didanai oleh Wali Kota.

c. Peraturan

Dalam pelaksanaan penertiban pedestrtian ini harus ada peraturan yang mengaturnya, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak penertiban dengan pihak yang ditertibkan. Peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak ada terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali, dan sulit diatur.

Adanya peraturan ini guna memberi tahu kepada setiap lapisan masyarakat khususnya masyarakat pekanbaru agar menggunakan pedestrian sesuai dengan fungsi yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah.

2. Proses

Dalam pelaksanaan penertiban pedestrian ini harus mempunyai proses yang memenuhi standar agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan. Proses ini dilakukan guna untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi tahapan dalam pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru, agar mempermudah jalannya efektifitas penertiban. Adapun prosesnya berupa :

a. Sosialisasi

Salah satu tindakan penertiban terhadap pedestrian yang dilakukan dapat berupa sosialisasi yaitu berupa Pemberitahuan dan Pengarahan. Ini merupakan tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi atau kesalahan yang sama. Berdasarkan sosialisasi pelaksanaan penertiban pedestrian kepada masyarakat dan pedagang kaki lima diketahui bahwa upaya pihak pelaksanaan penertiban pedestrian mensosialisasikan pedestrian ini melalui media cetak (Koran), papan plang tentang aturan parkir. Tetapi hal ini belum menyeluruh dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan pedestrian seperti dapat dilihat dibawah ini :

Bahwa masih banyaknya kendaraan yang parkir diarea pedestrian dan pedagang buah yang selalu berjualan disekitar pedestrian tersebut. Disini bisa kita lihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara pedestrian tersebut. Andai saja masyarakat peka sedikit saja bahwa yang mereka lakukan itu salah tidak menutup kemungkinan bahwa pedestrian bisa berfungsi dengan baik dan para penajalan kaki bisa dengan nyaman berjalan dan berbelanja dengan nyaman disekitar area pedestrian tersebut.

Dengan sepeda motor parkir diarea pedestrian dan para pedagang berjualan disana ini membuat pedestrian kelihatan sangat sempit, terkadang para penjalan kaki lebih memilih berjalan dibawah ketimbang berjalan diatas pedestrian karena areanya yang sempit. Bukan itu saja para pedagang toko juga meletakkan sebagian barang jualannya diarea pedestrian ini semakin membuat pedestrian kelihatan sempit. Dan para pedagang toko juga meletakkan kendaraannya didepan toko ini bukan sejam atau duajam saja, tetapi dari mulai bukanya toko sampai tutupnya toko, lama sekali bukan ?

Kurang lebih ada 57 toko yang berada disekitar pedestrian andai kata setiap toko mempunyai karyawan 2 saja dan setiap karyawan membawa kendaraannya dan parkir didepan toko tempat mereka berkerja berarti ada 114 kendaraan yang berada disepanjang area pedestrian setiap harinya dan ini sangat menyedihkan sekali. Para pemilik toko yang memarkirkan kendaraannya di area pedestrian padahal sudah dipasang tiang-tiang penghalang tetapi mereka tetap saja meletakkan kendaraannya didepan toko masing-masing, dan para pedagang kaki lima yang masih saja bandel dan tetap berjualan diarea pedestrian. Sebenarnya tidak perlu pemasangan tiang-tiang seperti ini andai saja mereka bisa mengerti dan memahami bahwa pedestrian itu bukan tempat parkir apalagi untuk berjualan.

Berdasarkan hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian pada indikator sosialisasi adalah kurang baik atau lebih tepatnya kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari gambar diatas masih banyaknya

kendaraan yang parkir dipedestrian dan pedagang kaki lima yang berjualan disana.

b. Penertiban

Untuk melihat adanya penyimpangan yang terjadi terhadap pedestrian yang mana fungsi gunanya adalah untuk penjalan kaki. Pihak UPTD parkir melakukan penertiban dengan cara menrazia para kendaraan bermotor yang parkir dipedestrian, razia ini dilakukan dengan pihak kepolisian. Berdasarkan dari hasil dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan penertiban pedestrian ini rutin dilakukan oleh UPTD Parkir namun masih ada juga kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima yang menyalah gunakan pedestrian tersebut, ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi pedestrian.

c. Sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penertiban pedestrian adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila masyarakat melakukan kesalahan dan akan dikenakan berupa teguran dan penilangan. Sementara sanksi bagi kendaraan bermotor yang parkir di kawasan pedestrian tersebut adalah berupa teguran pertama dan diberikan langsung dilapangan, dan penilangan. Walaupun telah diterapkan sanksi bagi penyalahgunaan pedestrian tetapi masih juga banyak juga ditemukannya penyimpangan yang terjadi.

Dari hasil diatas dapat kita ketahui bahwa sangat penting diberikan sanksi kepada pengguna sepeda motor yang melanggar peraturan dengan tujuan agar setiap pengguna sepeda motor tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang sama setiap harinya

3. Output

Output merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam hal penertiban ini. Output adalah hasil langsung dari suatu proses, dengan adanya output kita mengetahui bagaimana hasil dari suatu proses, apakah proses yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal atau tidak. Dan berikut untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan penertiban pedestrian :

a. Efektifitas Penertiban

Dalam hal pengukuran efektif apa tidaknya pelaksanaan penertiban pedestrian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan. Dilihat dari input dan proses yang telah dilakukan selama ini. Dari hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan penertiban pedestrian Kota Pekanbaru oleh Dinas perhubungan belum efisien dan efektif. Karena masih banyaknya para pedagang yang berjualan di area pedestrian, ini jelas sangat mengganggu penjalan kaki untuk berjalan di pedestrian. Seharusnya Dinas Perhubungan meningkatkan lagi upaya untuk melakukan penertiban ini agar pedestrian dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk penjalan kaki dan bukan untuk yang lainnya. Apabila pedestrian ini dapat berfungsi sesuai dengan fungsi tidak menutup kemungkinan Kota Pekanbaru akan keliatan lebih indah dan lebih rapi. Dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Pekanbaru.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penertiban Pedestrian di Kota Pekanbaru

a. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan penertiban pedestrian yang dilakukan oleh dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD parkir. Partisipasi masyarakat juga dapat berupa kritik / laporan dan saran yang disalurkan melalui media cetak.

Selain itu bentuk partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Misalnya tidak memarkirkan kendaraan di area pedestrian dan tidak berjualan di area tersebut. Hal ini sesuai dengan Himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyimpangan atau menggunakan pedestrian diluar fungsinya. Faktor partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pelaksanaan penertiban pedestrian. Hal ini dikarenakan inti dari pelaksanaan penertiban pedestrian merupakan suatu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan kata lain masyarakat disini mendapatkan hak-haknya yang harus diberikan pemerintah guna mendapatkan kenyamanan dalam berjalan kaki. Termasuk dalam perakteknya masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban. Adapun partisipasi masyarakat yang berupa kesadaran masyarakat memang juga sangat kurang, masyarakat sebagai pengguna pedestrian cenderung menyalah gunakan pedestrian tersebut. Dalam visi Kota Pekanbaru “ terciptanya masyarakat yang madani “ bukan masyarakat yang madani yang tercipta melainkan terciptanya masyarakat yang “mada-mada” yang kurang mengertinya akan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Dari hasil penelitian para pedagang tersebut dapat digambarkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan pedestrian yang ada. Walaupun sudah dihimbau oleh pihak Wali Kota Pekanbaru bahwa masyarakat dilarang berjualan atau menggunakan pedestrian diluar fungsinya. Namu demikian, masyarakat tetap saja tidak peduli dengan hal-hal demikian. Hal ini akan memicu maraknya pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di area pedestrian. Jika masyarakat sebagai pengguna pedestrian sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna pedestrian dalam memelihara pedestrian tersebut. Tentu saja pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru ini, termasuk juga kerja sama masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengingat masyarakatlah pihak pertama yang merasakan dan menggunakan pedestrian tersebut. Masyarakat bukan menguasai lahan-lahan pedestrian ini menjadi lahan untuk berdagang atau lain sebagainya dan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah, hal ini tentu menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, mengenai efektifitas pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota

Pekanbaru (studi kasus Jalan Sudirman) maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan sebagai kesimpulan dalam penulisan ini yaitu : “ bahwa efektifitas pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru (studi kasus Jalan Sudirman) dilihat dari semua indikator mulai dari input, output, dan proses “ masih belum efektif dan terlaksana dengan baik “ hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya para pengguna sepeda motor parkir di area pedestrian dan para pedagang kaki lima yang masih berjualan disepanjang pedestrian yang diakibatkan kurangnya penertiban yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan, karena penertiban yang dilakukan hanya 2 bulan sekali dan pemberian sanksi kurang tegas kepada pengguna sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya diarea pedestrian dan para pedagang kaki lima yang sering kali berjualan disepanjang area pedestrian menyebabkan mereka melakukan pelanggaran berulang kali. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru yang dilihat dari indikator partisipasi masyarakat masih belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam penertiban pedestrian ini. Yang menjadi faktor yang sangat penting dalam melakukan pelaksanaan penertiban pedestrian ini adalah faktor partisipasi masyarakat, karena apabila sumber daya manusia telah ada dan dana yang sangat mendukung tetapi masyarakat itu sendiri tidak memiliki kesadaran akan arti pentingnya pedestrian terhadap keselamatan penjalan kaki dan keindahan kota maka tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

SARAN

Dari peneliti yang telah penulis lakukan dan masalah-masalah yang ditemukan, penulis memberikan bebrapa saran yang diharapkan dapat membangun dan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh Pemerintah atau dinas terkait dalam meningkatkan pelaksanaan penertiban pedestrian di Kota Pekanbaru (studi kasus Jalan Sudirman), yaitu sebagai berikut :

- a. Sebaik Pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus berkerja keras dalam meningkatkan penertiban terhadap pedestrian, dan penertiban ini sebaiknya dilakukan terus menerus supaya tidak adalah masyarakat yang menyalah gunakan pedestrian dan juga pemberian sanksi yang tegas dari UPTD Parkir terhadap masyarakat yang melanggar.
- b. Bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait guna untuk mempermudah pelaksanaan penertiban pedestria, terutama koordinasi antara unit yang paling atas sampai unit yang paling bawah maupun dengan pihak masyarakat. Dengan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan razia. Sebaiknya pemerintah harus menyediakan dana khusus untuk Dinas Perhubungan dalam melakukan pelaksanaan penertiban pedestrian agar penertiban dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di harapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Gibson, Ivancevich, dkk. Oganisasi dan Manajemen, Erlangga : Jakarta, 1997

- Gibson, James L, dkk. Organisasi, Erlangga : Jakarta, 2005
- Hadaningrat, Soewarno, 1985. Pengantar Study Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung.
- Hessel Nogi, 2005. Manajemen Publik, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lubis Hari dan Husein Martani. 1998. Teori Organisasi. Pusat-pusat antar Universitas Ilmu-ilmu sosial. Universitas Indonesia.
- Keban. T. Yeremias, 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan. Yogyakarta.
- Mulyasa. 2002. Manajemen berbasis sekolah. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sedarmayanti. 2009. Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Mandar Maju. Bandung
- Steers Richard, M. 1995. Terjemahan Mahdalena Yasmin, Efektifitas Organisasi, Erlangga, Jakarta.
- Syamsu Ibnu. 2000. Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.
- Sarwato, 2002, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Setiawan, Salam, 2004, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Penerbit, Jembatan, Jakarta.
- Terry. R, George, 2003, Prinsip-prinsip Manajemen, Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogy, 2005, Manajemen Publik, Penerbit : Grasindo, Jakarta
- Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.